

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN

Tety Elida

*Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
Jl. Margonda Raya No. 100 Depok 16424, Jawa Barat
tety@staff.gunadarma.ac.id*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan ekonomi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan mengetahui indikator yang belum terpenuhi oleh masyarakat sebagai wujud partisipasinya. Data yang digunakan berupa kuesioner, yang disebarakan kepada 81 orang responden yang menerima dana bergulir P2KP. Data kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil kuesioner menunjukkan semua indikator bernilai di atas 60%, dan hasil rata-rata lima indikator yang digunakan 72.89%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Pancoran Mas cukup aktif.

Kata Kunci: *P2KP, tingkat partisipasi masyarakat, dana bergulir*

PEOPLE'S PARTICIPATION LEVEL ON AGAINST POVERTY PROGRAM IN BIG CITY ACTIVITY

Abstract

This research is intended to measure participation of inhabitants in supporting Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). The research as well is intended to identify unfullfil indicators as. research instrument is questionnaire, which was distributed to 81 respondents. Respondents are them who received revolving fund from P2KP. Further, data was analyzed using statistics methods, namely descriptive statistics. Result shows that all indicators are scored above 60%, with mean value is 72.89%. It can be implied that inhabitants participation level in kelurahan Pancoran Mas can be categorized as active.

Key Words : *P2KP, inhabitants participation, revolving fund*

PENDAHULUAN

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan salah satu program nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. Upaya-upaya tersebut diletakkan dan dipercayakan kepada masyarakat

dengan dukungan fasilitasi dari pemerintah, pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

Penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan model pembangunan partisipatif yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dan kemampuan aparat birokrasi dalam menjalankan fungsi lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rak-

yat. Model ini mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal (Soekamto, dkk., 2006). Senada dengan Soekamto, Setyono (2002) menyatakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa diharapkan partisipasi aktif masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai masalah pembangunan desa yang dihadapi dengan alternatif pemecahannya yang secara utuh dilaksanakan oleh masyarakat.

Masyarakat sebagai pelaku utama dalam program ini, dituntut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan dan keberlanjutan program P2KP. Apabila masyarakat berpartisipasi aktif, maka diharapkan pada kegiatan selanjutnya dapat berkembang atas kemauan dan kemampuan mereka sendiri. Dua prinsip inilah yang menjadi inti dari konsep pemberdayaan P2KP, yaitu partisipatif dan kemandirian. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dikoordinasikan oleh BKM setempat, bersama dengan masyarakat sekitar melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap P2KP, dapat diukur dalam beberapa indikator seperti yang dikemukakan Fatma (2007) yaitu pengorganisasian pelaksanaan P2KP, sosialisasi, pemberian pelatihan, pengorganisasian masyarakat dan pembentukan pengorganisasian kelompok (KSM), pendampingan dan pengawasan. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Soekamto, dkk. (2006) kadar partisipasi masyarakat dapat diukur melalui 3 dimensi, yaitu pengembangan kegiatan sosial ekonomi, asas gotong royong dan keswadayaan, tersedianya dana untuk modal usaha, guna dikembangkan oleh masyarakat miskin itu sendiri.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yasa (2008), mengatakan bahwa pembangunan partisipatif dapat dipenuhi dengan adanya visi, misi, strategi dan aksi pembangunan untuk rakyat, sasaran pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi

masyarakat, mekanisme perencanaan yang sesuai, tim pembina pembangunan sebagai koordinator menggerakkan pembangunan lintas sektor dan lintas daerah serta pengendalian proses pembangunan, instrumen pembangunan sebagai wahana pemihakan kepada rakyat melalui sumber pembiayaan yang jelas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi, APBD, investasi swasta, dan swadaya masyarakat.

Sesuai dengan visi dan misi kota Depok, yang ditujukan untuk mensejahterakan warganya dengan mengembangkan perekonomian masyarakat dan dunia usaha, program P2KP telah digulirkan kepada sejumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di kota ini. Partisipasi masyarakat melalui keikutsertaan mereka sebagai anggota KSM dalam pelaksanaan pinjaman bergulir pada P2KP sangatlah diharapkan, guna mewujudkan pembangunan kota Depok yang berkelanjutan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mengetahui besarnya tingkat partisipasi masyarakat kelurahan Pancoran Mas dalam kegiatan ekonomi terhadap pinjaman dana bergulir P2KP.

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah anggota KSM yang memperoleh pinjaman dana bergulir P2KP pada BKM Bina Budi Mulya yang berlokasi di kelurahan Pancoran Mas, Depok. Sampel yang digunakan 81 responden, yang diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Sarwono, 2006):

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

dimana :

n : Sampel

N : Populasi (sebanyak 415)

d : Derajat Kebebasan (digunakan 10%)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Indikator yang dikembangkan dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat sesuai dengan yang dikemukakan Fatma (2007), Soekamto, dkk. (2006) dan Yasa (2008) yang telah disesuaikan dengan tujuan P2KP. Indikator tersebut tertera pada Tabel 1.

Kuesioner yang diberikan kepada responden, berupa pernyataan tertutup yang dirancang dalam skala likert dengan lima pilihan jawaban, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak ada pendapat, setuju, sangat setuju. Pilihan jawaban

yang paling positif akan diberi skor 5, dan berurutan sampai yang paling negatif bernilai 1. Jawaban responden akan diartikan sebagai berikut (a) jika $Kuartil\ III < Skor\ responden < Maksimal$; artinya sangat positif (partisipasi masyarakat dinilai aktif), (b) jika $Median < Skor\ responden < Kuartil\ III$; artinya positif (partisipasi masyarakat dinilai cukup aktif), (c) jika $Kuartil\ I < Skor\ responden < Median$; artinya negatif (partisipasi masyarakat dinilai kurang aktif), (d) jika $Minimal < Skor\ responden < Kuartil\ I$; artinya sangat negatif (partisipasi masyarakat dinilai tidak aktif).

Tabel 1. Indikator Partisipasi Masyarakat Terhadap P2KP

Indikator	Tolok Ukur
Sosialisasi P2KP kepada Masyarakat	Masyarakat mencari tahu informasi mengenai P2KP.
	Informasi mengenai P2KP didapatkan melalui kelurahan atau RT/RW setempat
	Pemberitahuan mengenai adanya P2KP bagi masyarakat dilakukan secara jelas.
Pengorganisasian Kelompok (KSM)	Kemudahan dalam permohonan pengajuan dana.
	Prosedur dalam mendapatkan modal usaha dari P2KP.
	Adanya P2KP membantu pemecahan masalah usaha yang dihadapi anggota.
Tersedianya Aset Usaha yang Dimiliki Anggota	Dana yang digunakan sebagai modal usaha adalah milik pribadi.
	Tempat yang digunakan untuk berusaha adalah milik pribadi.
	Alat usaha yang digunakan dalam menjalankan usaha adalah milik pribadi.
Pendampingan oleh Fasilitator	Peran pendampingan kelompok.
	Peningkatan keterampilan anggota kelompok dengan pendampingan yang diberikan.
	Fasilitator mudah ditemui oleh anggota KSM.
Penyaluran Dana BLM	Proses pencairan dana cepat.
	Dana yang dicairkan sesuai dengan jumlah yang diminta.
	Dana bergulir P2KP hanya diberikan bagi masyarakat yang memiliki usaha.
	Besarnya cicilan untuk pengembalian dana, sesuai dengan kemampuan anggota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BKM

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bina Budi Mulya didirikan pada tanggal 18 November 2003 dan berkedudukan di kelurahan Pancoranmas, kecamatan Pancoranmas, kota Depok. BKM ini didirikan dengan tujuan sebagai wadah penyaluran bantuan program dana bergulir masyarakat. Penerima bantuan adalah kelompok masyarakat yang telah memiliki usaha yang disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Pada tahun pertama kegiatannya BKM Bina Budi Mulya menerima dana P2KP sebesar Rp 500 juta melalui Departemen Pekerjaan Umum, Dirjen Tipta Karya. Dana P2KP tersebut sebagian digunakan bagi pembangunan infrastruktur dan Rp 305 juta digunakan bagi usaha ekonomi bergulir.

Pada saat turunnya dana bergulir P2KP, pada kelurahan Pancoran Mas telah terdapat 163 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai penerima dana bergulir. Seratus enam puluh tiga KSM penerima dana tersebut, adalah masyarakat yang sebelumnya telah memiliki usaha dan kelompok usaha yang baru terbentuk akibat adanya program P2KP. Sesuai dengan aturan P2KP, KSM yang terbentuk adalah kelompok usaha sejenis, tetapi pada kenyataannya aturan ini sangat sulit diterapkan pada kelurahan Pancoran Mas. Masyarakat dengan usaha

sejenis cenderung tidak mau bergabung dalam KSM yang sama.

Sejak mulai digulirkannya dana pada tahun 2003, terjadi peningkatan jumlah penerima dana bergulir perorangan pada tahun berikutnya yaitu sebanyak 103 orang. Setahun kemudian jumlah KSM bertambah menjadi 172 kelompok dan 243 penerima perorangan (Tabel 2). Peningkatan jumlah penerima perorangan ini diakibatkan penolakan sebagian anggota kelompok dalam memikul beban usaha yang macet anggota kelompoknya (tanggung renteng), sehingga kemudian tiap kelompok mulai memisahkan diri sebagai usaha perseorangan. Pertambahan jumlah KSM, juga menjadi indikator berkembangnya kegiatan ekonomi pada BKM Bina Budi Mulya.

Pengukuran Tingkat Partisipasi Masyarakat

Pada bagian ini akan diukur mengenai tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan indikator yang telah demukakan sebelumnya.

Sosialisasi P2KP kepada Masyarakat

Indikator ini memiliki tiga butir pertanyaan, yaitu masyarakat mencari tahu sendiri informasi mengenai P2KP, informasi mengenai P2KP didapatkan melalui kelurahan atau RT/RW setempat, dan pemberitahuan mengenai adanya P2KP diberitahukan secara jelas. Hasil perhitungan tiap tolok ukur dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Jumlah Penerima Dana BKM Bina Budi Mulya

Tahun	Jumlah Penerima Dana	
	Kelompok	Perorangan
2004	163	-
2005	163	98
2006	172	243

Sumber : Data BKM Bina Budi Mulya

Tabel 3. Indikator Sosialisasi P2KP kepada Masyarakat

No	Indikator	Skor	Median
1.	Masyarakat mencari sendiri informasi mengenai P2KP	136	243
2.	Informasi P2KP diperoleh dari kelurahan atau RT/RW	336	243
3.	Pemberitahuan mengenai P2KP jelas	279	243
Total		751	
Rata-rata		250.33	243

Masyarakat diberitahukan mengenai program dana bergulir secara terbuka, melalui RT atau RW, berdasarkan surat edaran yang diperoleh dari kelurahan setempat. Hal ini didukung pula oleh hasil perhitungan tolok ukur ini, sebesar 336. Pemberitahuan keberadaan P2KP dirasakan cukup jelas, dengan perolehan skor yang didapatkan sebesar 279.

Namun dari data yang didapatkan, diketahui bahwa sebagian besar dari responden sebelumnya tidak pernah mencari informasi tentang upaya bantuan dari pemerintah tentang pengembangan usaha mereka. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah skor tolok ukur tersebut yang hanya mencapai angka 136. Berdasarkan keterangan mereka di lapangan, rata-rata mereka diberitahu oleh Ketua RT/RW setempat atau petugas dari kelurahan, yang mendatangi mereka dari rumah ke rumah. Hanya sedikit dari mereka yang kemudian mencari tahu sendiri informasi mengenai P2KP. Kondisi ini sesuai dengan yang dikemukakan Imron, dkk (2006) bahwa penyebaran informasi pada masyarakat desa akan lebih efektif melalui institusi lokal pada desa tersebut. Walaupun demikian, secara keseluruhan skor yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 250.33. Nilai

ini sedikit lebih besar dari nilai mediannya, yang artinya tergolong aktif.

Pengorganisasian Kelompok (KSM)

Indikator pengorganisasian kelompok (KSM) berkaitan dengan kegiatan proses seleksi bagi KSM dalam mendapatkan pinjaman dana bergulir. Indikator ini memiliki tiga tolok ukur, yaitu kemudahan dalam permohonan pengajuan dana, prosedur dalam mendapatkan modal usaha, dan kelompok dalam P2KP membantu pemecahan masalah yang dihadapi anggota. Tabel 4 menunjukkan hasil perhitungan dari tiap tolok ukur.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa dalam tatacara permohonan pengajuan dana dan prosedur mendapatkan modal usaha dari P2KP tidak menyulitkan anggota. Proses seleksi yang dilakukan oleh BKM secara umum dimulai dengan mengisi formulir permohonan, kemudian UPK memeriksa ke lapangan apakah memang yang bersangkutan mempunyai usaha atau tidak. Jika hasil temuan positif, permohonan akan diberikan dengan mempertimbangkan besar pengajuan dana dan kondisi keuangan BKM saat itu. Pernyataan tersebut didukung pula oleh skor yang didapatkan dari kedua tolok ukurnya, yaitu sebesar 330 dan 337.

Tabel 4. Indikator Pengorganisasian Kelompok (KSM)

No	Tolok Ukur	Skor	Median
1.	Kemudahan dalam perolehan dana	330	243
2.	Prosedur dalam mendapatkan modal usaha P2KP	337	243
3.	P2KP membantu memecahkan masalah yang dihadapi anggota	318	243
Total		985	
Rata-rata		328.33	243

Sumber : Hasil Perhitungan Kuesioner

Sedangkan dalam memecahkan masalah, hampir semua responden berpendapat bahwa keberadaan P2KP dapat membantu memecahkan masalah modal usaha anggota KSM. Dengan adanya P2KP, mereka merasakan bahwa permasalahan kesulitan permodalan mereka dalam menjalankan usaha sudah mulai teratasi. Hal ini juga didukung oleh skor yang diperoleh yaitu sebesar 318. Dan dari keseluruhan tolok ukur ini, maka skor yang diperoleh untuk indikator pengorganisasian kelompok (KSM) ini adalah sebesar 328.33.

Tersedianya Aset Usaha yang Dimiliki Anggota

Tolok ukur yang digunakan sebagai ketersediaan aset usaha adalah modal usaha yang digunakan, tempat yang digunakan untuk menjalankan usaha, dan alat usaha yang digunakan. Wujud partisipasinya dilihat dari kepemilikan mereka terhadap aset-aset usaha tersebut. Hasil perhitungan dari masing-masing tolok ukur wujud partisipasi dilihat dari kepemilikan dapat dilihat pada Tabel 5.

Ketersediaan aset usaha sangat penting bagi masyarakat yang ingin membuka usaha ataupun melanjutkan usa-

hanya. Aset usaha yang dimiliki secara pribadi (tidak meminjam, menyewa, dan sebagainya), dimaksudkan untuk memperlancar usaha mereka dan tidak menghambat jalannya usaha. Dari hasil kuesioner didapatkan bahwa dari ketiga aset yang dimaksud, ketiganya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sendiri aset usahanya.

Pendampingan oleh Fasilitator

Pada indikator ini, digunakan tiga tolok ukur yaitu peran pendampingan kelompok, peningkatan keterampilan anggota dengan keterampilan yang diberikan, dan keberadaan fasilitator. Hasil perhitungan terhadap ketiga tolok ukur pendampingan fasilitator dapat dilihat pada Tabel 6.

Pendampingan ini diwujudkan dalam bentuk penugasan konsultan dan fasilitator beserta dukungan dana operasional guna mendampingi dan memberdayakan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di kelurahan masing-masing. Jenis kegiatan pendampingan mencakup pertemuan, musyawarah, diskusi ditingkat komunitas kelurahan/desa dan kecamatan baik dalam pengambilan keputusan maupun penyebarluasan informasi.

Tabel 5. Indikator Tersedianya Aset Usaha yang Dimiliki Anggota

No	Tolok Ukur	Skor	Median
1.	Dana untuk modal usaha adalah milik pribadi	381	243
2.	Tempat untuk usaha adalah milik pribadi	318	243
3.	Alat untuk menjalankan usaha adalah milik pribadi	390	243
Total		1089	
Rata-rata		363	243

Tabel 6. Indikator Pendampingan oleh Fasilitator

No	Tolok Ukur	Skor	Median
1.	Peran pendampingan kelompok	255	243
2.	Peningkatan keterampilan anggota dengan pendampingan	246	243
3.	Fasilitator mudah ditemui oleh anggota KSM	231	243
Total		732	
Rata-rata		244	243

Secara keseluruhan dapat dikatakan pendampingan oleh fasilitator di kelurahan Pancoran Mas belum menunjukkan partisipasi yang berarti. Kehadiran fasilitator masih dirasakan kurang dan belum dapat meningkatkan keterampilan anggota dari sisi administrasi maupun kemampuan mengelola usaha. Secara keseluruhan skor yang diperoleh untuk indikator ini hanya sebesar 244, walaupun demikian, angka tersebut masih berkisar di atas skor median yang sebesar 243.

Purwatiningsih, dkk. (2004) menyatakan bahwa dalam pembangunan masyarakat pedesaan, peran pendampingan menjadi faktor penentu, karena masyarakat memerlukan dorongan psikologis dalam kegiatan mereka. Oleh karena itu pemerintah harus konsisten menyediakan tenaga fasilitator pada masing-masing wilayah.

Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Pada indikator ini digunakan empat tolok ukur, yaitu proses pencairan dana cepat, kesesuaian dana dengan jumlah yang diminta, peruntukkan dana bergulir dan besarnya pengembalian dana sesuai dengan kemampuan anggota. Hasil perhitungan untuk keempat tolak ukur penyaluran dana bantuan langsung masyarakat dapat dilihat pada Tabel 7.

Sebagai bentuk bantuan dana yang diberikan, BLM ini bersifat stimulan dan sengaja disediakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih dengan mencoba melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan.

KSM yang dapat menerima dana bergulir ada beberapa. Pertama adalah KSM baru yang belum pernah memperoleh pembiayaan P2KP baik untuk kepentingan usaha atau ekonomi maupun untuk prasarana fisik (prioritas). KSM yang kedua adalah KSM lama yang sudah melunasi pinjaman dan mempunyai catatan pengembalian yang baik dan masih membutuhkan modal untuk pengembalian lebih lanjut.

KSM ke tiga yang menerima adalah KSM lama di mana pencairan tahap sebelumnya belum dapat memenuhi pelayanan pinjaman kepada semua anggotanya. Selain hal tersebut di atas, dana bergulir dapat dipergunakan untuk kepentingan pelatihan baik berupa hibah maupun berupa pinjaman, tergantung jenis, tujuan serta penerima manfaat tujuan tersebut. Hal ini diusulkan oleh KSM sesuai dengan aturan yang ada di dalam manual.

Pernyataan tersebut di atas, didukung pula oleh skor yang didapatkan oleh tolok ukur no. 1-3, yaitu sebesar 304, 307 dan 319. Namun dilihat dari pengukuran terhadap keempat tolok ukur tersebut, dapat diketahui bahwa besarnya cicilan dalam pengembalian dana memiliki skor yang terendah yaitu sebesar 232. Hal ini dapat diartikan bahwa besarnya cicilan yang dibayarkan dirasa memberatkan para anggota. Walaupun demikian, skor rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 290.5, dan masih berada di atas rata-rata.

Tabel 7. Indikator Penyaluran Dana BLM

No	Tolok Ukur	Skor	Median
1.	Proses pencairan dana cepat	304	243
2.	Dana yang dicairkan sesuai dengan yang diminta	307	243
3.	Dana BLM hanya diberikan bagi yang memiliki usaha	319	243
4.	Besarnya cicilan sesuai dengan kemampuan anggota	232	243
Total		1162	
Rata-rata		290.5	243

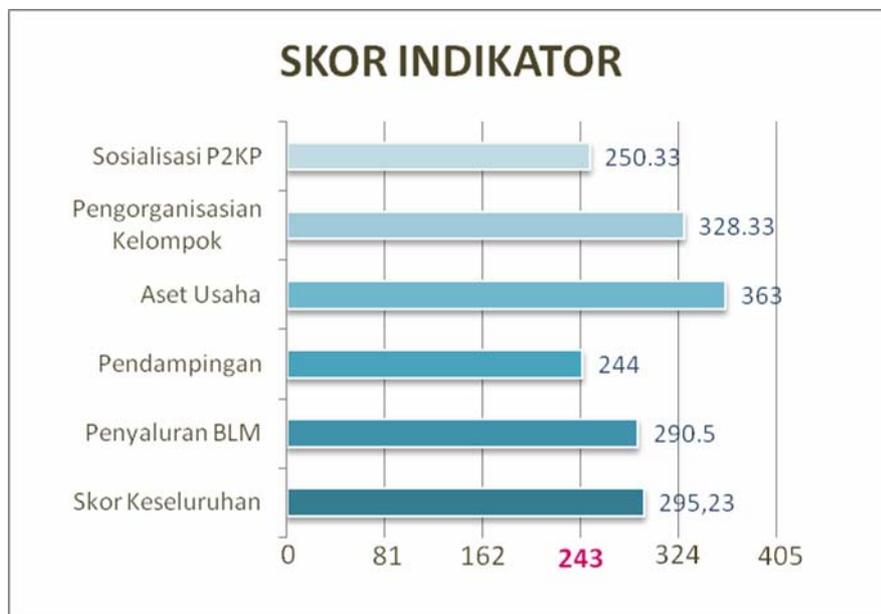
Secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat pada Gambar 1. Skor masing-masing indikator yaitu sosialisasi P2KP kepada masyarakat (250,33), pengorganisasian kelompok (KSM) (328,33), tersedianya aset usaha yang dimiliki anggota (363), pendampingan oleh fasilitator (244), dan penyaluran dana BLM (290,5) berada pada area di atas median (lebih dari 243). Hal ini menunjukkan bahwa dari semua indikator yang ada, sudah dapat dipenuhi oleh masyarakat Kelurahan Pancoran Mas sebagai wujud partisipasi mereka dalam mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi P2KP.

Dan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi tersebut, dapat dilihat dari skor keseluruhan yang diperoleh. Pada diagram tersebut terlihat bahwa skor keseluruhan yang diperoleh adalah sebesar 295,23. Skor tersebut berada

diantara area median dan kuartil III, atau pada area positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Pancoran Mas dalam mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi dari P2KP dapat dikatakan cukup aktif. Apabila dipersentasekan, maka besarnya tingkat partisipasi adalah:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Partisipasi} &= \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\% \\ &= \frac{295,23}{405} \times 100\% \\ &= 72,89\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Pancoran Mas (72,89%) cukup positif dalam mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi dari P2KP.



Gambar 1 . Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Kegiatan Ekonomi di Kelurahan Pancoran Mas

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Pancoran Mas dalam mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi dari program bantuan dana bergulir P2KP adalah cukup aktif, yaitu sebesar 72.89%. Tidak ada indikator yang belum terpenuhi oleh masyarakat Kelurahan Pancoran Mas, karena semuanya bernilai diatas rata-rata (>60%).

DAFTAR PUSTAKA

- Fatma, N. 2007 *Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Keberlangsungan Kegiatan Pembangunan Fisik Dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) (Studi Kasus : Kelurahan Situsaeur Dan Kelurahan Sukahaji, Kota Bandung)* <http://digilib.sunanampel.ac.id>. diunduh 27 Mei 2008.
- Imron, M.A., 2006 "Peran Institusi Lokal dalam Pembangunan Desa" *Jurnal*

Ilmiah Administrasi Publik vol VI no 1.

- Muluk, K. 2006 "Membangun Kapasitas Pemerintahan Desa" *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* vol VI no 1.
- Purwatiningsih, A., Ismani, Noor, I., 2004 "Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa" *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* vol IV no 2.
- P2KP. 2006 *Pedoman Teknis P2KP* <http://www.p2kp.org>. diunduh tanggal Mei 2008.
- Soekamto, H., Soeprapto, R., Noor, I., 2004 "Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota) Malang)" *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* vol VI no 2.
- Yasa, I G.W.M., 2008 "Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Provinsi Bali" *Jurnal Ekonomi dan Sosial* vol 1 No 2.